



**PEMERINTAH KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR**

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

NOMOR PEMKAB : 100.3.7.1/ 6 /Setda-KSP
NOMOR DPRD : 01 /NKB/DPRD/VI/ 2025
TANGGAL : 14 Juli 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HERMAN**
Jabatan : **BUPATI INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. Akasia No. 1 Tembilahan**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

2. a. Nama : **IWAN TARUNA, ST, M.Si**
Jabatan : **Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
b. Nama : **Ir. H. AMD. JUNAIDI AN, M.Si**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
c. Nama : **ASMADI, S.H**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**
d. Nama : **H. ANDI RUSLI, S.M**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Alamat Kantor : **Jl. HR.Soebrantas Tembilahan**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tembilahan,

2025

Selaku
PIHAK PERTAMA



Selaku
PIHAK KEDUA



(Ir. H. AMD. JUNAIDI AN, M.Si)
WAKIL KETUA

(ASMADI, S.H)
WAKIL KETUA

(H. ANDI RUSLI, S.M)
WAKIL KETUA